

No.39, Mei 2010

ISSN 1410-895X

# **ARAH REFORMASI INDONESIA**

**Pendidikan dan Sejarah**

**INDONESIA  
DALAM KONTEKS *GLOBAL WARMING*:  
PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI,  
DAN SOLUSI UNTUK MENANGGULANGINYA**

Yohanes Maria Vianey Mudayen

**IMPLEMENTASI ASPEK HUMANIORA  
DALAM KAJIAN SEJARAH**

Anton Haryono

**PERAN *KEIRETSU*  
DALAM SISTEM INDUSTRI  
DAN PERDAGANGAN JEPANG**

Y. R. Subakti



**LEMBAGA PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

# ARAH REFORMASI INDONESIA

---

## Pendidikan dan Sejarah

---

### DEWAN REDAKSI

#### Pelindung:

Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J.  
*Rektor Universitas Sanata Dharma*

#### Penasihat:

Dr. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.  
*Wakil Rektor I Universitas Sanata Dharma*

#### Pemimpin Redaksi:

Dr. G. Budi Subanar, S.J. Licc. Miss.  
*Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma*

#### Sekretaris Redaksi:

Harris Hermansyah Setiajid, S.S., M.Hum.  
*Kepala Pusat Penerbitan dan Bookshop Universitas Sanata Dharma*

#### Anggota Redaksi:

Dr. Vet. Asan Damanik, M.Si., Dr. Anton Haryono, M.Hum., Dewi S. M.Sc., Apt.,  
Y. Heri Widodo, M.Psi., Dr. T. Priyo Widiyanto, M.Si., Dr. Susento, M.S.,  
Lucia Kurniawati, S.Pd., MSM., R. B. Dwiseno Wihadi, S.T., M.Si.,  
B. Soelistijanto, S.T., M.Sc., Drs. A. Kahu Lantum, M.S., Drs. S.R.L. Aji Sampurno, M.Hum.

#### Administrasi/Sirkulasi:

Agnes Sri Puji Wahyuni, Bsc.  
Maria Imaculata Rini Hendriningsih, S.E.  
Thomas A. Hermawan Martanto, Amd.

#### Alamat Redaksi:

LPPM SADHAR  
Jl. Affandi (Gejayan) Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002  
Telepon: (0274) 513301, 515352, ext. 1527  
Fax: (0274) 562383.

E-mail: [lemlit@staff.usd.ac.id](mailto:lemlit@staff.usd.ac.id)

Redaksi terbuka untuk menerima tulisan dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan religi dari pembaca. Tulisan ditulis berdasarkan disiplin ilmu masing-masing sehingga mempunyai landasan teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tulisan diketik pada kertas kuarto dengan dua spasi, antara 15 - 20 halaman, dan dikirim ke alamat redaksi.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>1. INDONESIA DALAM KONTEKS <i>GLOBAL WARMING</i>: PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN SOLUSI UNTUK MENANGGULANGINYA</b> .....	1
Abstrak .....	1
1.1 Pendahuluan .....	2
1.2 Pemanasan Global .....	3
1.3 Berbagai Kejadian sebagai Fenomena Pemanasan Global .....	4
1.4 Penyebab Pemanasan Global .....	7
1.5 Gas Rumah Kaca .....	8
1.6 <i>Global Warming</i> : Ancaman Terbesar Planet Bumi .....	9
1.7 Dampak Pemanasan Global terhadap Perekonomian Dunia .....	11
1.8 Dampak Pemanasan Global bagi Negara Indonesia .....	13
1.9 Respon Indonesia terhadap Pemanasan Global .....	16
1.10 Harapan Baru Penanganan Pemanasan Global .....	18
1.11 Solusi untuk Menanggulangi Pemanasan Global .....	20
1.12 Penutup .....	22
Daftar Pustaka .....	24
<b>2. IMPLEMENTASI ASPEK HUMANIORA DALAM KAJIAN SEJARAH</b> .....	27
2.1 Pengantar .....	27
2.2 Sejarah Bukan Hanya Politik Masa Lalu .....	29
2.3 Penguatan Metode dan Metodologi .....	38
2.4 Penutup .....	46
Daftar Pustaka .....	48

<b>3. PERAN KEIRETSU DALAM SISTEM INDUSTRI</b>	
<b>DAN PERDAGANGAN JEPANG .....</b>	<b>51</b>
3.1 Pendahuluan .....	51
3.2 Terbentuknya Keiretsu dalam Struktur Industri dan Perdagangan Jepang .....	55
3.3 Persaingan antar Keiretsu di Jepang .....	82
3.3 Peran Keiretsu dalam Perkembangan Ekonomi Jepang ....	86
3.4 Kesimpulan .....	89
Daftar Pustaka .....	94
Catatan Kaki .....	96
Lampiran-lampiran .....	97
Keiretsu Fuyo .....	97
Keiretsu Mitsubishi .....	98
Keiretsu Mitsui .....	102
Keiretsu Nissan .....	103
Keiretsu Sumitomo .....	104
<b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>	<b>106</b>



## **IMPLEMENTASI ASPEK HUMANIORA DALAM KAJIAN SEJARAH**

---

Anton Haryono

### **2.1 Pengantar**

Humaniora adalah rumpun ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi (lebih berbudaya). Bermula dari bahasa dan sastra klasik, humaniora kini juga meliputi teologi, filsafat, hukum, filologi, kesenian, dan sejarah (Hassan Shadily, t.th: 1350). Benarkah sejarah akan membuat manusia lebih berbudaya? Mungkin berpijak dari pandangan seperti itu Sukarno pernah menyerukan "JAS MERAH", "jangan sekali-kali melupakan sejarah". Pemkot Surakarta baru-baru ini juga berusaha menggali nilai-nilai masa lalu sebagai jalan menuju masa depan yang lebih produktif, dengan slogan yang terkesan provokatif-antiquaristik "SOLO MASA DEPAN, SOLO MASA LALU". Bisa jadi hal ini merupakan semangat awal menuju era renaissans Jawa.

Bila masa depan dipahami sebagai tipe ideal, maka masa lalu yang dirujuk tentu saja fakta-fakta sejarah yang dianggap memenuhi idealitas. Menghindari realitas masa lalu yang kontraproduktif bagi tipe ideal masa depan dengan sendirinya juga merupakan keniscayaan. Untuk itu, Barrack Obama pun dalam rangka memperbaiki hubungan negaranya dengan sejumlah negara di Amerika Latin tanpa ragu-ragu berkata: "Saya tidak mau mendebat masa lalu, saya datang untuk sebuah masa depan. Kita harus belajar dari sejarah dan sebaiknya jangan terjebak pada sejarah." (Kompas, 9 April 2009). Di sini terlihat adanya perbedaan antara belajar sejarah dan mengukuhkan sejarah. Yang pertama berada pada domain cita-cita kebaruan, sedangkan yang kedua pada ranah kekolotan atau konservatisme.

Bila ditilik dari cita-cita kebaruan darinya, maka belajar sejarah bisa dipahami sebagai belajar lebih membudaya, sebuah pergulatan mencapai tata kehidupan yang dianggap lebih baik. Sebagai contoh, petani miskin membanting tulang demi sekolah anak sering merupakan cita-cita kebaruan yang lahir dari pemahaman atas ketidaknyamanan sosial masa lalu. Dari pemahaman dan kesadaran sejarahlah bila pada awal abad ke-20 kaum terpelajar mulai memikirkan Indonesia baru (Sartono, 1990 dan Pringgodigdo, 1991). Begitu pula, tanpa kesadaran sejarah atas keburukan-keburukan regim otoriter Orde Baru, tidak akan muncul gerakan reformasi. Belajar sejarah pun kemudian bisa dipahami sebagai upaya untuk lepas dari jerat sejarah.

Siapa pun tidak pernah akan bisa menghitung berapa banyak petuah-petuah bijak berbasis pengalaman masa lalu telah dihasilkan oleh peradaban dan menjadi panduan bagi banyak generasi. Tuturan pengalaman bisa muncul di mana pun dan kapan pun, tidak terkecuali pada masyarakat primitif. Bisa saja orang bertutur tanpa pretensi apapun kecuali ingin bertutur; tetapi, tuturan pengalaman berpeluang memperkaya wawasan para pendengarnya dan sangat mungkin dijadikan referensi bagi pembaruan sikap dan tindakan mereka. Dari situ bisa diketahui arti penting komunikasi pengalaman, atau bentuk sederhana dari proses belajar sejarah yang terbebas dari kerumitan norma-norma akademik. Ungkapan Jawa, "*sing wis ya wis*" tidak akan muncul jika tidak ada pemahaman terhadap "yang sudah", dan hal ini tidak lain demi "yang akan".

Usaha untuk menyelami masa lalu telah lama mengalami proses sistematisasi ke dalam ranah keilmuan, yakni ilmu sejarah. Rentang masa lalu yang bisa dijangkau semakin panjang dan spektrumnya pun meluas. Persoalannya adalah, bagaimana ilmu ini harus dikembangkan agar misi pembudayaannya bisa diaktualisasikan dengan lebih optimal. Hal ini penting mengingat, untuk kasus Indonesia, pengetahuan dan respektasi umum terhadap ilmu sejarah masih rendah. Mata pelajaran sejarah di sekolah-sekolah cenderung tidak disukai oleh siswa. Dalam keadaan tidak disukai, mungkinkah misi kemanusiaan sejarah bisa disampaikan sesuai dengan harapan? Pertanyaan serupa juga pantas diajukan ketika sejarah dikonstruksikan secara paksa untuk menopang kekuasaan politik dan sekaligus untuk menjinakkan rakyat.



## **2.2 Sejarah Bukan Hanya Politik Masa Lalu**

### **2.2.1 Sejarah Politik Konvensional**

Dalam rentang waktu yang cukup lama, penulisan sejarah didominasi oleh sejarah politik, yakni sejak abad ke-5 SM (Barnes, 1962: 29-32) hingga akhir abad ke-19 (Sartono, 1992: 165). Pada abad ke-19, seiring dengan munculnya nasionalisme, penulisan sejarah politik di Eropa semakin ditarik untuk memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara, mewujudkan dalam bentuk sejarah nasionalistik, atau bahkan chauvinistik (Barnes, 1962: 207-238). Dalam sejarah politik konvensional, kisah perang dan diplomasi amat menonjol; pemeran utamanya adalah raja, panglima perang, dan negarawan. Ini adalah akibat dari anggapan bahwa jalannya sejarah ditentukan oleh kejadian politik, militer, dan diplomasi, serta tindakan para tokoh besar (Sartono, 1992: 165).

Sejarah politik hingga sekarang masih menyita banyak perhatian. Silabus di sekolah-sekolah, daftar buku terlaris, dan program-program televisi memberi kesan tentang hal itu (John Tosh, 1991: 73). Alasan-alasan untuk dominasi sejarah politik cukup jelas. Negara sendiri berkepentingan atas penulisan sejarah. Para penguasa ataupun orang-orang yang memiliki aspirasi untuk berkuasa membutuhkan panduan untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Penguasa juga berkepentingan untuk meningkatkan konsumsi publik atas versi sejarah yang bisa melegitimasi posisi mereka dalam lembaga politik. Lagi pula sejarah politik selalu menemukan sejumlah pembaca awam yang fanatik karena pelukisannya yang dramatik (Tosh, 1991: 73).

Sejarah nasional yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia juga sarat dengan sejarah politik. Silabus seperti itu tanpa disadari telah membentuk pandangan seolah-olah sejarah hanya merupakan politik (orang besar) masa lalu. Tidak aneh jika kemudian ada orang awam dalam bidang ilmu sejarah terkejut ketika menjumpai seorang sejarawan sedang bertekun untuk menulis sejarah kehidupan kaum buruh atau sejarah petani. Padahal di lingkungan sejarawan akademik di Indonesia sudah agak lama terdapat kecenderungan kuat ke arah studi sejarah non-politik. Barangkali karena skripsi, tesis, dan disertasi bidang sejarah tidak banyak dipublikasikan secara luas, pengetahuan masyarakat umum tentang studi sejarah tidak banyak berubah.

Bahwa sejarah nasional sering ditumpangi kepentingan penguasa juga bukan hal yang sulit untuk ditemukan di Indonesia. Pada zaman Orde Baru, buku-buku sejarah (politik), bahkan juga karya-karya sastra tertentu, yang tidak sejalan dengan sejarah versi pemerintah dibredel. Seakan-akan kebenaran sejarah merupakan hak prerogatif penguasa. Untuk itu, ketika regim Orde Baru rontok dan kebebasan berpendapat mulai mendapat tempat, isu-isu pelurusan sejarah pun mengemuka. Dalam diskusi-diskusi dan seminar-seminar, terutama pada masa awal isu pelurusan sejarah, tidak jarang para guru sejarah merasa bingung tentang versi mana yang benar.

### **2.2.2 Sejarah Politik Gaya Baru**

Lantas, apakah sejarah politik harus ditinggalkan? Sama sekali tidak, bahkan perlu dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas. Ketika disadari bahwa penguasa politik akan menyusun sejarah versinya sendiri, maka tulisan-tulisan ilmiah yang netral dari kepentingan politik justru sangat dibutuhkan. Meskipun fungsinya sebagai koreksi kritis atas versi pemerintah, karya-karya baru itu akan lebih bermanfaat jika tidak diberi label “pelurusan sejarah”. Pelabelan demikian, selain bertentangan dengan relativitas sejarah, hanya akan menimbulkan reaksi sengit penguasa yang pada dasarnya ingin memonopoli konstruksi sejarah. Dalam masyarakat yang semakin cerdas, biarlah pembaca melakukan penilaian sendiri. Tugas penulis yang lebih penting adalah meyakinkan pembaca melalui penyajian data yang lebih lengkap dan analisis yang lebih tajam, yang tidak mengisolasi fenomena politik dari berbagai faktor non-politik.

Selain itu, banyak tema baru yang bisa digarap. Indonesia pasca Orde Baru yang amat kaya partai politik menawarkan banyak isu politik kontemporer. Melihat latar belakang sosial, ekonomi, dan intelektual para politisi lokal, dan perjuangan mereka memperebutkan kursi DPRD, tidak kalah berharganya dengan usaha menyusun biografi seorang jenderal besar. Menakar konsistensi ideologi dan garis perjuangan partai dalam setiap langkah politik, dan akibat-akibat yang muncul, juga penting untuk dilakukan, apalagi jika ditempuh dalam studi komparasi. Persoalan-persoalan lain, seperti politik uang, politisi “kutu loncat”, partai “dinasti”, demokrasi prosedural, pemilih ideologis



vs pemilih pragmatis, janji-janji politik, dan netralitas birokrasi dalam pemilu, relevan untuk diketahui sebab-akibatnya dari berbagai sisi. Memetakan “golongan putih” berdasarkan kelas sosial dan meneliti alasan masing-masing pun produktif untuk diperolehnya pelajaran bagi perbaikan kehidupan politik. Tentu tidak kalah berharga bila seorang peneliti sejarah memfokuskan kajian pada ketegangan-ketegangan di tingkat akar-rumput yang sering terjadi pada masa pemilu.

Pemilihan kepala daerah, bahkan kepala desa, juga kaya akan persoalan. Persaingan tajam untuk memperebutkan jabatan kepala desa bisa menjadi subyek penelitian dalam lingkup lokal ataupun nasional. Pemilu 2009 juga menyajikan kesempatan untuk penelitian tentang perjuangan para mantan kepala desa dalam berebut kursi DPRD Tingkat II. Ini semua memberi petunjuk begitu luasnya cakupan sejarah politik yang bisa digarap, sekaligus tanpa harus bersitegang dengan pemangku kekuasaan politik nasional sehubungan dengan klaim-klaim kebenaran mereka. Masih banyak persoalan lain, yang bila diteliti dalam koridor ilmiah akan memberi sumbangan berharga bagi pembelajaran politik, termasuk di dalamnya tentang akomodasi politik-lokal ataupun nasional–terhadap kaum perempuan.

Kini sudah bukan zamannya lagi bagi studi sejarah politik untuk berkuat sebatas pada peristiwa-peristiwa besar dan kiprah orang-orang besar. Agar lebih berdayaguna, studi sejarah politik harus mengurangi secara tajam sifat-sifat tradisionalnya, termasuk dalam hal penyajian yang deskriptif-naratif. Gaya penyajian ini sering menjadikan sejarah bukan sebagai media pembelajaran yang baik. Celaknya, tipe sejarah yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan ini lazim dibebankan kepada siswa untuk dihafal. Tidak aneh jika pelajaran sejarah oleh banyak siswa dianggap membosankan. Memang, pertanyaan bagaimana dan mengapa juga ada di dalamnya, tetapi masih sangat minim dan dangkal.

Dari realitas memprihatinkan di atas, terdapat signifikansi dan urgensi untuk disajikannya konstruksi sejarah politik yang deskriptif-analitis. Fakta-fakta dasar bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami keterkaitannya dengan realitas pelingkup: sosial, ekonomi, kultural, intelektual, dll. Inilah yang disebut sejarah politik gaya baru yang lebih produktif, lebih luas cakupannya, dan lebih kaya nilai. Melaluinya,

sejarawan bisa menyusun sejarah pemikiran politik, konstitusi dan perundang-undangan, institusi politik, perilaku politik, perbandingan politik, aspirasi politik kelompok-kelompok sosial, kasus politik, dan biografi politik (Kuntowijoyo, 2003: 176-182). Karena cakupan studinya lebih luas, maka nilai-nilai pembelajaran sejarah politik gaya baru juga lebih besar daripada sejarah politik konvensional.

### **2.2.3 Penguatan Sejarah Non-Politik**

Implementasi humaniora secara lebih optimal mensyaratkan pula penguatan terhadap berbagai bentuk sejarah non-politik. Bila sejarah diyakini sebagai sumber keteladanan (Barnes, 1962: 32-33), maka semakin banyak aspek kehidupan yang berhasil dikaji semakin banyak pula keteladanan yang diperoleh. Perlu diingat lagi, masalah yang dihadapi manusia bukan hanya masalah politik. Bahkan, bagi sebagian besar orang, masalah politik berada di luar kepentingan mereka. Petani, nelayan, perajin, tukang, pedagang, buruh, pegawai, guru, siswa, ulama, seniman, pekerja sosial, dokter, perawat, dan institusi-institusi profesi yang menaungi, memiliki masalahnya masing-masing yang juga membutuhkan solusi. Artinya, penguatan terhadap berbagai kajian sejarah non-politik relevan untuk dilakukan, sehingga akan lebih banyak kelompok sosial yang bisa menikmati kegunaan praktis sejarah demi “kebaruan” masing-masing.

Semua aspek kehidupan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapat perhatian sejarawan (Peter Burke, 1992: 14-17). Jangan sampai keluhan ahli agronomi Inggris Arthur Young terabaikan. Ahli tersebut pernah berkata: “Bagi pikiran yang telah berubah, setidaknya setelah penyelidikan filsafat, membaca sejarah modern umumnya merupakan pekerjaan yang menyiksa. Orang bisa diganggu dengan tindakan-tindakan sederet tokoh yang disebut penakluk, pahlawan, dan jenderal besar, dan kita mengarungi halaman-halaman buku penuh kisah kaum militer. Namun, ketika kita ingin mengetahui kemajuan pertanian, perdagangan, dan industri, serta pengaruhnya satu sama lain dalam zaman dan negara yang berbeda-beda, semuanya kosong” (Tosh, 1991: 74). Jangan sampai pula olok-olok para pembela aliran *Annales*—sejarawan sosial Perancis—terhadap penulisan sejarah politik dan biografi tokoh besar berlalu begitu saja (Tosh, 1991: 93). Sejarah



non-politik, yang antara lain meliputi sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah pemikiran, dan sejarah mentalitas perlu ditingkatkan kehadirannya.

*Sejarah Ekonomi.* Menurut Barry E. Supple (1963: 4), sejarah ekonomi membahas usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, institusi-institusi dan hubungan-hubungan yang diperlukannya, perubahan-perubahan teknik dan pandangan yang berkaitan dengan usaha tersebut, dan keberhasilan atau kegagalan yang terjadi. Sementara itu, W.J. Ashley merangkum basis material kehidupan sosial, cara kebutuhan dan perlengkapan hidup dihasilkan, organisasi pekerjaan, distribusi barang, institusi distribusi, perubahan-perubahan dalam metode pertanian, industri, dan perdagangan, serta usaha untuk melacak perkembangan (Kuntowijoyo, 2003: 94).

Terlihat sejarah ekonomi menyajikan bahan kajian yang luas. Sejarawan bisa membahas secara menyeluruh ataupun memilih bagian-bagian tertentu yang dianggap penting. Ia bisa meneliti perkembangan ekonomi makro atau ekonomi mikro, pengaruh yang pertama terhadap yang kedua, atau bisa pula membicarakan dalam kategori spasi sosial, seperti sejarah ekonomi pedesaan atau perkotaan. Tentu saja sejarah institusional, seperti sejarah pertanian, perkebunan, perusahaan, kerajinan, dan perdagangan, tidak kalah penting. Dalam konteks ini, perspektifnya bisa diperluas dengan kajian analitis atas berbagai faktor pengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Aktivitas ekonomi suatu lokalitas bisa pula dikaji dalam kaitan dengan kejadian tertentu, seperti krisis ekonomi global. Krisis ekonomi supra lokal tidak otomatis membawa akibat yang sama bagi semua ekonomi lokal. Bagi suatu lokalitas, krisis ekonomi bisa menghambat, tetapi bisa pula memacu perkembangan. Bahkan, dalam lokalitas yang sama, dampak krisis ekonomi bisa tidak sama bagi aktivitas ekonomi yang berbeda. Dalam kasus Yogyakarta pada masa depresi 1930-an, misalnya, ketika industri batik terpuruk, industri anyam-anyaman dan tenun justru berkembang pesat. Bahkan, industri perak mampu mengukir prestasi fenomenalnya. Ketiga industri rakyat tadi, meskipun tetap berkembang baik pada zaman *meleset*, memiliki logikanya masing-masing (Anton Haryono, 2009). Dari sini tampak arti penting studi komparasi; dan, studi sejarah ekonomi tidak akan pernah kehabisan

tema, apalagi studi ini bisa dikolaborasikan dengan studi sejarah sosial, sehingga menjadi sejarah ekonomis-sosiologis, seperti yang pernah dilakukan oleh Burger (1957) untuk realitas Indonesia.

*Sejarah sosial.* Sejarah sosial sudah menggejala dalam penulisan sejarah sejak sebelum Perang Dunia II, tetapi sebagai sebuah gerakan yang penting baru mendapat tempat sekitar tahun 1950-an (Kuntowijoyo, 2003: 39), seiring dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial (Hobsbawn, 1971: 22-26). Bermula dari pengaruh aliran *Annales* yang lahir di Perancis pada tahun 1920-an, sejak beberapa puluh tahun yang lalu, di kalangan sejarawan di seluruh dunia terjadi pergeseran minat secara besar-besaran untuk meninggalkan sejarah politik tradisional menuju ke sejarah sosial (Burke, 1992: 19). Untuk menyesuaikan diri dalam periode perubahan sosial yang amat cepat, banyak orang semakin sadar akan pentingnya mengetahui asal-usul dirinya—keluarganya, kota atau desanya, pekerjaannya, sukunya, atau kelompok agamanya (Burke, 1992: 19). Dari kutipan tersebut, yang perlu ditekankan adalah persoalan penyesuaian diri (pembaruan) melalui pengetahuan sejarah.

Bahan garapan sejarah sosial sangat luas dan beraneka-ragam, kebanyakan juga memiliki hubungan erat dengan sejarah ekonomi (Kuntowijoyo, 2003: 39). John Tosh menemukan beberapa tipe sejarah sosial di Inggris: pertama, sejarah problem sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan, gangguan jiwa, dan penyakit (Tosh, 1991: 96). Pada persoalan ini masih bisa ditambah misalnya perbanditan, kekerasan, dan kriminalitas (Kuntowijoyo, 2003: 41), bahkan juga pelacuran, perdagangan manusia, dan peredaran obat-obat terlarang. Semua perlu diketahui akar-akar persoalannya agar bisa ditemukan solusinya. Kedua, sejarah kehidupan sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat; dan ketiga, sejarah masyarakat kelas bawah, yang nyaris absen dari sejarah politik dan muncul dalam sejarah ekonomi hanya sebagai pekerja atau konsumen anonim (Tosh, 1991: 97). Keempat, mengenai struktur sosial dan perubahan sosial, yang dari titik ini sejarah sosial mengarah ke sejarah masyarakat (Tosh, 1991: 99-100).

Kuntowijoyo (2003: 39-41) membuat klasifikasi tema yang agak berbeda. Selain tentang masyarakat dalam keseluruhan, tema-tema itu diantaranya tentang kelas sosial, peristiwa sosial, institusi sosial,



dan fakta sosial. Mengenai kelas sosial, sejarawan bisa memilih salah satu dari tiga lapisan utama masyarakat; bahkan bisa difokuskan pada persoalan desa atau kota, dataran rendah atau pegunungan, pesisir atau pedalaman. Tentang peristiwa sosial, sejarawan bisa meneliti protes sosial, pemberontakan petani, pemogokan buruh, kerusuhan rasial, dll. Mengenai institusi sosial, bisa disebutkan misalnya, sekolah, rumah sakit, badan amal, tarekat keagamaan, dan LSM. Termasuk di dalamnya adalah sejarah keluarga, yang karakternya tidak lepas dari berbagai latar belakang (kelas, golongan, status, kemampuan finansial, pendidikan, dan wilayah kultural).

Studi sejarah sosial bisa dilakukan pada tingkat nasional atau lokal, pada periode kapan pun (sejauh sumbernya tersedia), termasuk periode yang sedang berlalu. Peluang untuk studi komparasi juga sangat besar dan hasilnya menjanjikan banyak pelajaran. Sungguh ironis, selama ini sering dijumpai mahasiswa yang kebingungan ketika harus menemukan tema bagi skripsinya. Ketika sudah pada titik kritis, yang diajukan lagi-lagi-misalnya-Syahrir, Tan Malaka, Peran Pemuda Pejuang, kabinet ini kabinet itu, yang toh akhirnya tidak pernah bisa menghadirkan analisis baru. Padahal, sejarah ekonomi dan sejarah sosial menyediakan banyak tema dengan persoalan-persoalan yang tidak sulit dirumuskan. Selain itu, bila minatnya pada sejarah politik, sejarah politik gaya baru juga menyajikan banyak tema, termasuk di dalamnya politik lokal.

*Sejarah Kebudayaan.* Di tengah persaingan kekuatan-kekuatan besar dunia dalam arus globalisasi budaya dan universalisasi nilai-nilai, sejarawan dituntut menyumbangkan ilmunya bagi bangsanya dalam usaha mengenal diri sendiri agar rekayasa masa depan tetap berpijak pada jatidiri bangsa, dan dalam kaitan ini sejarah kebudayaan mempunyai peranan yang penting (Kuntowijoyo, 2003: 133). Kita bisa mengikuti Voltaire (1694-1788), yang mengartikan kebudayaan sebagai gabungan antara semangat, sikap, dan cara yang menuntun kehidupan sosial dan perilaku masyarakat; atau Burchardt (1818-1897), yang memahami sejarah kebudayaan sebagai sejarah kehidupan rohaniah suatu bangsa, dan melukiskan kesenian, agama, festival, negara, mitos, puisi, dan bentuk ekspresi kejiwaan lainnya dalam kesatuan tema; atau Huizinga (1872-1945), yang dengan tema umum berusaha

menemukan pola-pola kehidupan, kesenian, dan pemikiran secara bersama-sama (Kuntowijoyo, 2003: 136-143).

Studi sejarah kebudayaan di Indonesia perlu digairahkan, karena belum banyak dilakukan. Sering istana-istana raja dipahami sebagai pusat kebudayaan, tetapi bagaimana setiap istana menjalaninya masih perlu diteliti lebih lanjut. Dalam kehidupan yang saling pengaruh-mempengaruhi, kebudayaan tidaklah statis. Budaya Keraton Mataram zaman Senopati-misalnya-berbeda dengan yang tergelar pada zaman Mangkubumi dan masa sesudahnya, di mana pengaruh Barat semakin merasuk. Dari sini dinamika kebudayaan, baik pada aspek difusi, akulturasi, maupun asimilasi merupakan tema penting. Aktualisasi budaya di luar istana tentu saja juga memiliki hak untuk mendapat perhatian sejarawan. Studi sejarah kebudayaan pun tidak harus tentang realitas budaya yang terjadi jauh di masa lalu. Kecenderungan mutakhir, seperti mewabahnya budaya populer dari luar yang sering menimbulkan ketegangan antargenerasi penting untuk dijadikan fokus studi baru. Lagi pula, sejarah kebudayaan bisa disenyawakan dengan sejarah sosial seperti dilakukan Denys Lombard (2000) dalam buku tiga jilid tebal *Nusa Jawa: Silang Budaya*.

*Sejarah Pemikiran.* Studi sejarah tidak hanya berurusan dengan sikap dan tindakan manusia, tetapi juga pemikiran yang mendasari. Karena kehidupan manusia bersegi banyak, maka aspek pemikiran juga bermacam-macam: politik, agama, ekonomi, sosial, hukum, filsafat, budaya, dll (Kuntowijoyo, 2003: 190). Tugas sejarah pemikiran adalah membahas: 1) pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian sejarah; 2) konteks tempat pemikiran muncul, tumbuh, dan berkembang; dan 3) pengaruh pemikiran bagi masyarakat. Tugas yang pertama bisa diwujudkan dalam studi tentang genesis, konsistensi, evolusi, sistematika, perubahan, varian, komunikasi, dan dialektika pemikiran; kajian kedua meliputi konteks sejarah, politik, budaya, dan sosial; sementara yang terakhir mencakup pengaruh, implementasi, diseminasi, dan sosialisasi pemikiran pada masyarakat (Kuntowijoyo, 2003: 191-199).

Gilbert (1971: 89-94) melihat nilai lebih studi sejarah pemikiran yang membahas hubungan antara gagasan dan perhatian, pengaruh ide terhadap tindakan, dan keterkaitan antara sikap intelektual dan



tingkat sosial, dan sejenisnya. Menurutnya, tugas sejarawan intelektual adalah menyusun kembali pikiran individu atau kelompok pada suatu waktu ketika peristiwa khusus terjadi atau kemajuan tertentu tercapai. Tugas ini besar artinya, karena semua kekuatan yang mendasari proses sejarah tersaring melalui pikiran manusia dan ini akan menentukan kecepatan dan cara bekerjanya kekuatan-kekuatan itu. Lebih lanjut, Gilbert mengatakan, kesadaran manusialah yang menghubungkan faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan jangka panjang dengan peristiwa tertentu, dan pada titik penting dalam proses sejarah inilah sejarawan intelektual melakukan pekerjaannya.

Baru-baru ini isu tentang politik uang dalam pemilu mengemuka, bahkan beberapa politisi dalam perbincangan di televisi secara lantang merasa berada dalam kondisi diperas oleh (oknum-oknum) masyarakat. Sebaliknya, dalam perbincangan di warung-warung kopi sering muncul pernyataan dari sejumlah orang tentang "milih yang ada duitnya". Tidak mungkinkah realitas seperti ini ditelusuri ke dalam kompleksitas pikiran mereka tentang perilaku politik penguasa? Tidak mungkinkah sejarawan menelusuri jejak pikiran mereka sehingga keputusan untuk "memilih yang ada duitnya" bisa diketahui sebagai sebuah kesimpulan dari sederet pemahaman atas praksis (tidak senonoh) kekuasaan para politisi? Bila hal ini benar, bukankah pada benak mereka juga terdapat "tipe ideal" perilaku politik, tetapi yang tidak pernah terwujud dalam kehidupan sehari-hari? Bisa jadi, tudingan kepada mereka sebagai "tidak sadar politik" salah alamat. Menyelami pikiran manusia di balik tindakan-tindakannya sangat bermanfaat bagi usaha untuk memahami tindakan itu sendiri.

*Sejarah Mentalitas.* Kajian lain yang cukup dekat dengan sejarah pemikiran dan penting untuk dikembangkan adalah sejarah mentalitas, yang telah dirintis oleh Lucien Febvre, pendiri aliran *Annales* (Tosh, 1991: 103). Hanya saja, bila sejarah pemikiran berkenaan dengan prinsip-prinsip dan ideologi-ideologi yang diartikulasikan secara formal, maka sejarah mentalitas mengenai hal-hal yang bersifat emosional, naluriyah, dan implisit. Menurut Michele Vovelle, sejarah mentalitas adalah sejarah ketidaksadaran kolektif (Kuntowijoyo, 2003: 239-240). Kekerasan, kemarahan, kebencian, dan amuk massa suatu revolusi sosial bisa dikaji dalam konteks sejarah mentalitas. Di dalamnya

terdapat pengalaman kolektif yang tanpa disadari menggerakkan sikap dan tindakan tertentu.

Selain berbagai bentuk agresivitas (massa, etnis, dan agama), sejarah mentalitas bisa mengkaji tentang, misalnya, kegandrungan pada budaya asing, kultus individu, priyayinisasi, refeodalisasi, agama rakyat, keyakinan rakyat, kesenian rakyat, budaya populer, pengobatan tradisional, dll (Kuntowijoyo, 241-245). Kita pun sering mendengar penyebutan tentang mentalitas budak, mentalitas petani, mentalitas pedagang, mentalitas priyayi, mentalitas birokrat. Tugas sejarawan adalah merekonstruksi fakta-fakta mental, yang tanpa disadari telah menggerakkan sikap dan perilaku tertentu. Sejarah mentalitas yang disusun dengan baik berpeluang untuk memperbarui mentalitas.

Dari seluruh uraian di atas bisa ditegaskan bahwa mengisolasi diri dalam sejarah politik, apalagi dengan menganggap remeh sejarah non-politik, sama artinya dengan memasung humanioritas sejarah. Misi kemanusiaannya akan bisa tercapai lebih optimal apabila semua aspek kehidupan masa lalu manusia mendapat perhatian yang sama. Bahwa seseorang lebih memfokuskan pada sejarah politik atau sejarah sosial atau sejarah kebudayaan adalah perkara lain. Yang pasti, ilmu sejarah harus merengkuh semua segi kehidupan, baik yang diaktori oleh kaum elit maupun rakyat jelata, pada tingkat nasional ataupun lokal.

## **2.3 Penguatan Metode dan Metodologi**

### **2.3.1 Mencari Kebenaran, Bukan Pembeneran**

Karya sejarah akan dapat memenuhi fungsi pembelajaran/pembudayaannya bila disusun berdasarkan pada prinsip mencari kebenaran. Hal ini perlu ditekankan karena terdapat konstruksi sejarah, melalui klaim-klaim kebenarannya, tidak lebih daripada alat pembeneran atas sikap, tindakan, peran, dan kedudukan orang/kelompok kepentingan tertentu, dan/atau sebagai alat indoktrinasi masa kini. Sejarah versi penguasa politik, seperti telah disinggung di depan, merupakan salah satu contohnya.

Prinsip mencari kebenaran mensyaratkan sikap obyektif peneliti terhadap pokok persoalan yang dibahas. Ia tidak boleh berpihak kepada



kepentingan non-ilmiah apa pun, kendati subyek yang diteliti adalah—misalnya—partai politik yang sedang dipimpin, yang sesungguhnya penuh kepentingan politik. Diakui, sejarawan memang tidak mungkin bisa melepaskan subyektivitasnya secara mutlak. Namun, hal ini bukan halangan bagi tetap dipegangnya prinsip mencari kebenaran, yang bisa diwujudkan melalui penyelidikan yang tidak memihak dan bebas mengenai gambaran, proses, konsep, dan proses mental yang berbeda satu atau dua langkah dari realitas obyektif (Gottschalk, 1975: 28).

Pemeriksaan yang teliti terhadap sumber sejarah, melalui langkah yang lazim disebut kritik sumber, merupakan keniscayaan. Dalam hal ini, kemungkinan untuk keliru tetaplah ada, yang bisa muncul dari sumbernya sendiri atau dari pemahaman pihak peneliti. Namun, bila langkah ini ditempuh, maka usaha untuk menyusun konstruksi sejarah telah ada pada arah yang benar. Persoalannya menjadi lain samasekali bila rekonstruksi sejarah sejak awal diarahkan dengan cara-cara non-ilmiah sebagai alat pembenaran terhadap sesuatu demi kepentingan-kepentingan non-pembelajaran, seperti yang pernah dilakukan oleh para punggawa keraton ataupun kaki-tangan penguasa.

Menyangsikan segala bentuk informasi dan usaha keras untuk melepaskan kepentingan-kepentingan pribadi merupakan prasyarat bagi ditemukannya kebenaran. Peneliti pun kemudian perlu mencari sebanyak mungkin sumber informasi, sehingga ia bisa menilai dengan membandingkan satu dan lainnya lebih leluasa. Menganggap sumber sejarah, apa pun bentuknya, sebagai yang otomatis benar, merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip mencari kebenaran. Data-data kuantitatif bisa keliru karena ketidakteelitian pencatatan, atau bahkan bisa merupakan rekayasa untuk kepentingan-kepentingan tertentu oleh penyusunnya. Demikian pula, data-data kualitatif bukanlah realitas obyektif; di dalamnya terdapat unsur-unsur subyektif pihak pelapor, dan tidak jarang dimuati oleh tujuan-tujuan tertentu pula.

Contoh paling mutakhir adalah mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif 2009. DPT yang dibuat KPU ini sama sekali tidak menggambarkan jumlah riil orang yang memiliki hak pilih, karena banyak bukti menunjukkan bahwa jutaan orang pemegang KTP tidak terdaftar. Begitu pula, laporan-laporan kualitatif KPU dan Pemerintah

tentang penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, lancar, terkendali, dan penilaian sejenisnya tidak terlepas dari unsur-unsur subyektif demi kepentingan tertentu. Paling tidak berita-berita di media massa cetak dan elektronik menunjukkan gambaran lain. Tidak bisa diragukan, konstruksi sejarah pemilu akan berbeda antara yang ditulis semata-mata berdasarkan dokumen KPU dan Pemerintah dengan yang ditulis berdasarkan olahan berbagai sumber. Dari contoh ini, terlihat arti penting pengumpulan sumber sebanyak mungkin dan sikap kritis pihak peneliti dalam menilainya (tentang kritik sumber lih. Garraghan, 1957: 143-320 dan Norling, 1960: 42-62). Tentu, hanya sumber-sumber yang dianggap valid yang kemudian dipakai.

Dalam konteks Indonesia, dokumen kolonial sering menjadi andalan bagi peneliti sejarah. Memang, tipe dokumen ini amat banyak jumlahnya dan telah dikoleksi secara sistematis oleh Kantor Arsip Nasional di Jakarta dan lembaga-lembaga kearsipan di Belanda. Akan tetapi, penggunaannya memerlukan sikap kritis ekstra, terutama ketika perspektif Indonesia hendak dipakai. *Algemeen Verslag, Koloniaal Verslag*, dan *MvO*, misalnya, ditulis oleh pejabat kolonial sebagai laporan bawahan kepada atasan. Oleh karena itu, selain faktor ketidaktepatan, tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelaporan yang tidak membahayakan posisi pelapor, atau yang mendukung promosi jabatan, atau yang bernuansa ABS (Asal Bapak Senang). Hal lain yang perlu dikritisi adalah perspektif kolonial dalam laporan-laporan mereka. Tanpa sikap kritis, konstruksi sejarah bisa jatuh ke dalam kesia-siaan, kendatipun ia disusun bukan untuk suatu pembenaran.

Perlu disadari lagi, dokumen pemerintah dan lembaga-lembaga lain hanyalah sebagian kecil sumber sejarah. Di luar itu ada inskripsi, genealogi, kalender, annal, kronik, catatan harian, memoir, biografi, otobiografi, jurnal, surat, surat kabar, pamflet, poster, teks pidato, brosur, dll. (Garraghan, 1957: 111-113 dan Gottschalk, 1975: 57-73). Bahkan, berbagai bentuk karya sastra dan karya seni juga merupakan sumber sejarah yang sangat berharga (Gottschalk, 1975: 75-77). Candi, wihara, masjid, gereja, dan kelenteng juga bisa dipahami sebagai "teks" masa lalu. Selama ada kepekaan dan kemauan untuk menyelami, fungsi yang sama berlaku pula untuk rumah mewah di dusun miskin, kampung kumuh di metropolitan, sisa-sisa rel kereta api, reruntuhan benteng, tembok keraton, kolam renang, dan bangunan lain apa pun.



Dokumen resmi amat penting bagi penulisan sejarah, akan tetapi banyak informasi yang tidak tercantum di dalamnya bisa ditemukan dalam sumber-sumber lain. Demikian pula, banyak hal yang tidak termuat dalam sumber tertulis, bisa diperoleh secara mencukupi dari sumber lisan: tradisi lisan dan sejarah lisan (lih. Tosh, 1991: 206-227; Garraghan, 1957: 118-122 dan 130-131; Kuntowijoyo, 2003: 23-38; dan Huen, dkk., 2000). Tradisi lisan memuat berbagai bentuk tutur yang disampaikan dari generasi ke generasi, sedangkan sejarah lisan adalah informasi-informasi lisan yang digali melalui wawancara. Sejarah lisan memiliki manfaat yang besar untuk memperluas cakupan penelitian dan mendukung bagi berbagai jenis penulisan sejarah non-politik, khususnya yang menyangkut kehidupan masyarakat kebanyakan, yang sering tidak terekam (secara memadai) dalam sumber-sumber tertulis. Artinya, metode sejarah lisan relevan bagi usaha memperkuat aspek humaniora dalam kajian sejarah.

### **2.3.2 Menceritakan dan Menjelaskan**

Agar sejarah lebih bermanfaat sebagai sumber belajar, maka tugas sejarawan dalam menyusun karya tidak hanya terbatas pada usaha menceritakan kembali urutan kejadian, tetapi juga harus menjelaskan hubungan sebab-akibatnya. Hubungan kausalitas ini, dalam tuntutan mutakhir, tidak hanya berisi hubungan antar peristiwa, tetapi juga keterkaitannya dengan keadaan-keadaan apa pun yang melingkupi/multikausalitas (Sartono, 1992: 93-100). Dengan kata lain, sejarawan dituntut untuk melakukan analisis atas persoalan-persoalan yang dibahas dalam perspektif yang lebih luas. Selain menyajikan aspek diakronik, ia perlu pula menampilkan aspek sinkronik (Kuntowijoyo, 2003: 39-58).

Tuntutan baru untuk melakukan kajian yang analitis bersesuaian dengan kecenderungan besar sejarawan untuk menggeluti sejarah non-politik. Sejarah jenis ini, apalagi yang cakupan spasialnya terbatas pada lokalitas yang sempit (sejarah lokal lih. Goubert, 1971: 80-97; Taufik Abdullah, 1985), tentu tidak akan cukup menarik dan bermanfaat bila disusun dalam bentuk deskripsi saja. Analisis terhadap berbagai faktor pengaruh menjadi kebutuhan; dan dalam konteks ini, hubungan antara bidang kehidupan yang satu dan bidang-bidang lainnya bisa

diketahui. Bila hal ini tercapai, maka fungsi sejarah sebagai media pembelajaran demi pembaruan hidup akan teraktualisasi dengan lebih optimal.

Rasa ingin tahu yang bertolak dari pertanyaan mengapa pada dasarnya merupakan kebutuhan umat manusia. Kita dalam kehidupan sehari-hari akrab sekali dengan pertanyaan tadi. Ketika seseorang menjumpai anak yang sedang menangis, ia tidak hanya akan menyapa: "menangis ya?", tetapi lebih lanjut akan bertanya mengapa menangis. Begitu pula, ketika seseorang menemui temannya murung, pertanyaan spontan yang lazim adalah mengapa temannya itu murung. Pertanyaan "kamu murung ya?" bisa dipastikan akan disambung dengan ada apa atau mengapa, dan si penanya lebih senang jika jawabannya tidak hanya sepatah dua patah kata. Ia siap mendengarkan, karena ia ingin tahu lebih banyak. Anak kecil juga begitu, pertanyaan mengapa sering muncul darinya, "mengapa ibu sedih", "mengapa bapak lama tidak pulang", "mengapa kakak dikeluarkan dari sekolah", dsb. Contoh-contoh sederhana ini memberi petunjuk bahwa usaha mengetahui sebab-sebab sesuatu terjadi memiliki arti yang jauh lebih penting.

Kajian sejarah tentu juga akan lebih berharga, dan semestinya demikian, jika pertanyaan mengapa diajukan. Akan lebih berguna lagi bila pertanyaan itu tidak hanya diarahkan untuk mengetahui hubungan antar peristiwa, tetapi juga kaitan antara peristiwa-peristiwa dengan berbagai keadaan. Namun, analisis seperti ini mensyaratkan kerangka referensi yang lebih luas. Sejarawan tidak cukup hanya berbekal pada akal sehat saja. Pengetahuan dan pemakaian teori dan konsep yang dihasilkan ilmu lain, terutama ilmu-ilmu sosial (karena ilmu sejarah tidak memilikinya), merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari (lih. Burke, 1992; Kuntowijoyo, 2003). Artinya, agar kompetensinya memadai, sejarawan harus banyak belajar tentang ilmu-ilmu bantu itu, terutama ilmu yang berkaitan erat dengan minat utama studinya.

Perkembangan studi pasca sejarah politik konvensional memberi kemudahan dan sekaligus kesulitan baru. Begitu luasnya bidang kajian merupakan fasilitas tersendiri. Akan tetapi, kemudahan ini kemudian dibatasi oleh tuntutan baru yang cukup sulit, yakni pentingnya kajian analitis. Lagi pula, sejarawan dituntut untuk menggabungkan antara aspek diakronis dan sinkronis. Bagaimana solusinya? Kembali ke model



sejarah politik konvensional jelas merupakan kemunduran. Tidak ada cara lain bagi sejarawan kecuali mempertajam pengetahuannya tentang teori dan metodologi. Lebih lanjut, mengingat bidang kajian begitu luas dan tuntutan akan kelengkapan alat-alat analisis tidak bisa dihindari, sejarawan bisa memperingan beban dengan menspesialisasikan-atau lebih memfokuskan-pada bidang kajian tertentu.

Berbekal pengetahuan yang luas tentang teori dan konsep ilmu-ilmu sosial, apa pun-sejauh menyangkut aktivitas manusia-bisa diteliti dalam perspektif sejarah. Sebaliknya, tanpa bekal seperti itu, apresiasi terhadap tema-tema baru bisa jadi hanya akan menghasilkan karya yang menimbulkan cemoohan. Menurut hemat saya, sebagai contoh saja, pelacuran dan lokalisasi yang pernah marak pada zaman Orde Baru pun bisa menjadi kajian berharga jika dilakukan dalam perspektif yang luas. Selain bisa dihubungkan dengan persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, fenomena ini bisa dilacak kaitannya dengan-misalnya-politik penguasa, sekularisme, dan posisi perempuan dalam konteks budaya. Kajian dari segi kejiwaan juga bisa dikenakan untuk tema ini, seperti bagaimana para pelakunya menjalani hidup dalam dunia yang terbelah, antara dunia kecil "pelacuran" yang keras dan sesungguhnya tidak dikehendaki dengan dunia luas "kemasyarakatan" yang menuntut sikap dan perilaku tertentu. Paling tidak dari kajian seperti ini bisa diketahui bahwa pelacuran bukan semata-mata dan pertama-tama masalah moralitas.

### **2.3.3 Publikasi dan Mengatasi Masalah Bahasa**

Arah baru yang lebih berdaya guna dalam studi sejarah tidak hanya perlu disambut dengan serangkaian penelitian, tetapi juga dengan publikasi luas atas hasil-hasil penelitian. Terlalu mahal bagi skripsi, tesis, disertasi, dan karya penelitian lain bila hanya berhenti di rak-rak perpustakaan. Masyarakat berhak mengetahui hasilnya, karena dari dan mengenai masyarakatlah sejarah disusun. Mengisolasi karya ilmiah pada batas-batas ruang perpustakaan sama artinya dengan membatasi kegunaan praktis (misi pembelajaran) sejarah.

Bila minimnya publikasi berkaitan dengan mutu karya yang tidak memadai, maka solusinya adalah peningkatan mutu. Penyiapan sejak

tahun pertama sebagai mahasiswa melalui pengayaan pengetahuan, pembuatan makalah, dan praktik penelitian secara berkesinambungan perlu dilakukan. Sejak awal harus disadari bahwa tugas utama jurusan ilmu sejarah yang adalah menyiapkan lahirnya sejarawan profesional, orang yang pekerjaannya menulis sejarah. Bahwa di kemudian hari banyak alumni sejarah tidak mengamalkan ilmunya (karena pekerjaan) adalah perkara lain, sehingga tidak boleh mereduksi tugas tadi.

Berpijak dari arti pentingnya bagi masyarakat, publikasi luas atas hasil-hasil penelitian sejarah merupakan kebutuhan. Namun, hal ini bukan tanpa kendala. Bila sasarannya adalah masyarakat luas, karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi biasanya tidak bisa langsung diterbitkan. Keberatan yang sering muncul dari penerbit adalah bahwa tulisan terlalu akademis, sehingga perlu penyesuaian, baik dari segi sistematika maupun bahasanya. Bisa saja suatu bagian yang dianggap penting dari segi akademis justru disarankan penerbit untuk dikurangi atau bahkan dibuang.

Tututan akademis untuk kepentingan akademis tentu harus dilaksanakan. Namun, tuntutan bagi suatu bacaan umum (demi segmen pembaca yang lebih luas) dalam logika penerbit juga perlu diapresiasi. Alasannya, ketika naskah akademis hendak diterbitkan dan harus disusun ulang lebih dulu, pihak penulis sendirilah yang mesti melakukannya. Dalam konteks ini, prinsip yang harus dipegang adalah bagaimana sistematika dan pembahasaan baru tidak mengurangi atau menghilangkan substansi dasarnya. Atau apabila dibalik, bagaimana dinamika suatu fenomena sejarah dan kompleksitas hubungan sebab-akibatnya bisa disajikan dalam sistematika yang lebih sederhana dan gaya bahasa yang lebih luwes (lancar mengalir, mudah dipahami).

Tugas sejarawan adalah menceritakan kembali dan sesuai dengan tuntutan historiografi baru sekaligus menjelaskan secara komprehensif fenomena masa lalu yang ditelitinya. Oleh karena itu, kemampuan untuk memakai bahasa tulis yang baik dan benar menjadi prasyarat yang harus dipenuhi. Baik, dalam pengertian runtut dan komunikatif; benar, dalam pengertian sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Tanpa kemampuan bahasa yang memadai, sulit kiranya konstruksi sejarah bisa disusun dan dikomunikasikan dengan baik



dan berdaya guna. Apalagi, sejarawan harus bisa membangun komunikasi tertulis dalam dua lingkungan, akademis dan masyarakat luas.

Kuliah-kuliah kebahasaan tentu sangat penting bagi mahasiswa sejarah; namun, kegiatan ini belum mencukupi. Latihan menyampaikan gagasan secara tertulis harus telah dilakukan sejak semester pertama dan sesering mungkin, baik dalam bentuk pembuatan makalah, artikel, resume, tinjauan buku, atau pun laporan hasil penelitian kecil. Ujian-ujian pada setiap perkuliahan pun akan turut mendukung bila disusun dalam bentuk esai. Selain melatih kemampuan analitis, model ujian ini potensial untuk meningkatkan mutu bahasa tulis mahasiswa. Bila itu semua diterapkan secara konsisten, tidak ada alasan lagi bagi dosen untuk bersusah payah mengoreksi aspek bahasa dalam konsep skripsi mahasiswa.

Menurut hemat saya, mata kuliah jurnalistik amat penting bagi mahasiswa sejarah, bahkan semestinya menjadi mata kuliah wajib. Mata kuliah ini bermanfaat untuk memberi bekal kepada mahasiswa dalam membangun komunikasi kekaryaan mereka kelak dengan lingkungan yang lebih luas (masyarakat umum). Jangan sampai mahasiswa hanya bisa menyusun makalah, laporan hasil penelitian, dan skripsi; tetapi, berkat mata kuliah jurnalistik, mereka juga mampu membuat resensi buku, ulasan berita, artikel, dan tajuk. Melalui mata kuliah jurnalistik mereka akan paham adanya perbedaan antara tuntutan akademis dan publikasi umum, baik dalam aspek sistematika maupun bahasanya. Mereka kelak juga tidak akan kesulitan ketika harus mengubah karya akademisnya menjadi buku bacaan sesuai tuntutan penerbit tetapi tanpa harus mereduksi substansi pokoknya.

Membaca sebanyak mungkin buku sejarah, tidak terbatas pada buku-buku dalam silabus, tentu akan sangat bermanfaat. Cara ini, selain akan memperkaya pengetahuan tentang fenomena sejarah, juga signifikan bagi diketahuinya macam-macam metodologi, sistematika, dan gaya bahasa penulisan. Diharapkan, pembacaan yang lebih intensif menyasar pada buku-buku yang erat kaitannya dengan bidang kajian yang akan menjadi fokus perhatian (spesialisasi). Hal ini penting karena setiap bidang kajian memiliki spesifikasinya sendiri yang perlu didalami

lebih lanjut. Mengandalkan materi perkuliahan teoretik saja tidak cukup bagi kemudahan-kemudahan dalam rekonstruksi sejarah yang lebih baik.

Tidak kalah penting adalah kemauan besar untuk membaca karya-karya sastra. Selain sebagai salah satu jenis sumber sejarah, karya sastra akan memberikan pengetahuan tentang cara bercerita yang baik, kendati cara-cara khasnya tidak bisa diambil-alih begitu saja untuk suatu konstruksi sejarah. Pembacaan luas karya-karya sastra juga memungkinkan mahasiswa sejarah atau pun sejarawan selaku pribadi menyampaikan pengetahuan sejarahnya untuk kepentingan umum dalam bentuk karya sastra (novel sejarah). Paling tidak, sebagai contoh, pengetahuan luas Mangunwijaya tentang sejarah Indonesia dan dunia hadir dalam novel-novelnya, seperti tampak dalam *Burung-burung Manyar* dan *Burung-burung Rantau*. Barangkali memang perlu ada matakuliah kesastraan bagi mahasiswa sejarah, kendati tidak wajib, yang orientasinya adalah pembacaan karya-karya sastra, khususnya novel/roman sejarah.

## **2.4 Penutup**

Implementasi aspek humaniora akan lebih optimal manakala kajian sejarah: 1) tidak membatasi pada peristiwa-peristiwa besar dan keaktoran orang-orang besar saja, tetapi merengkuh semua aspek kehidupan manusia dan keaktoran siapa pun di masa lalu; 2) tidak hanya membicarakan fenomena-fenomena yang terjadi jauh di masa lalu, tetapi juga yang baru saja terjadi; selain yang berlingkup nasional, juga yang berlingkup lokal, termasuk unit yang paling kecil semacam kampung; 3) netral dari kepentingan-kepentingan non-ilmiah (non-pembelajaran), berpijak pada fakta-fakta yang teruji secara cermat, dan diarahkan untuk mencari kebenaran, bukannya membenaran politis; 4) tidak hanya menceritakan kembali fenomena masa lalu, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat dari fenomena itu dalam dimensi yang luas; 5) mampu menghasilkan aneka macam karya publikasi yang tidak hanya bisa dinikmati oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh masyarakat luas.



Terdapat beberapa syarat bagi Jurusan Sejarah agar kelima hal tadi terinternalisasi secara baik dalam diri mahasiswa sedemikian rupa sehingga bisa menjadi pegangan dasar bagi setiap kegiatan keilmuan mereka. Pertama, mata kuliah historiografi, metode sejarah, dan metodologi sejarah perlu mendapatkan proporsi yang besar dan perhatian yang lebih serius, karena dalam ketiga mata kuliah inilah terkandung jati diri ilmu sejarah. Kedua, mata kuliah ilmu-ilmu bantu, seperti sosiologi, ekonomi, antropologi, psikologi, dan politik, harus diusahakan aplikatif bagi kepentingan sejarah. Pemakaian teori dan konsep ilmu-ilmu sosial dalam kajian sejarah perlu mendapatkan contoh-contohnya, sehingga lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Ketiga, mata kuliah jurnalistik tidak hanya perlu, tetapi akan lebih baik jika menjadi mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa memiliki keterampilan untuk melakukan publikasi pengetahuan sejarahnya melalui pers dalam berbagai bentuk. Keempat, mata kuliah kesastraan (pembacaan luas karya-karya sastra) juga perlu dihadirkan, paling tidak sebagai mata kuliah pilihan. Selain sejarah serumpun dengan sastra sebagai ilmu humaniora, karya sastra bersifat multifungsi bagi daya hidup sejarah: sebagai sumber sejarah, referensi pembandingan model narasi dan kebahasaan, sekaligus sumber inspirasi bagi mereka yang hendak menuangkan pengetahuan sejarahnya dalam bentuk karya sastra. Kelima, praktik penulisan karya ilmiah maupun karya ilmiah populer sangat perlu untuk ditradisikan, karena melalui langkah ini sikap kritis dan kecakapan menyampaikan gagasan secara tertulis akan terasah.

Ketika sejarah ditulis secara paksa untuk sebuah pembenaran dan alat legitimasi, humanioritasnya dikesampingkan. Ketika sejarah ditulis tanpa sikap kritis, kendati bukan untuk sebuah pembenaran, humanioritasnya dipertaruhkan. Netralitas dan sikap kritis merupakan prasyarat bagi kajian sejarah yang bermakna. Ketika dua sikap ini dilengkapi dengan kemauan dan kemampuan yang memadai untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai fenomena masa lalu, humanioritas sejarah akan mengemuka. Sejarah yang benar adalah sejarah yang mampu menunjukkan misi kemanusiaan atau misi pembudayaan, yang memperbarui, yang membebaskan, bukannya membebani atau membelenggu kehidupan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Barnes, Harry Elmer. 1963. *A History of Historical Writing*. New York: Dover Publications, Inc.
- Burger, D. H. 1957. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia I dan II*, Jakarta: J.B. Wolters.
- Burke, Peter. 1992. *History and Social Theory*, Cambridge: Polity Press.
- . 2009. "Chavez Salami Obama: Musuh Lama AS Dirangkul". *Kompas*. Minggu, 9 April 2009, hlm. 15, kolom 5.
- Garraghan, Gilbert J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Gilbert, Felix. 1971. "Intellectual History: Its Aims and Methods". Dalam *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences*.
- Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Goubert, Pierre. 1971. "Local History". Dalam *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences*.
- Haryono, Anton. 2009. "Industri Pribumi Daerah Yogyakarta Masa Kolonial, 1830-an – 1930-an". Disertasi, UGM, Februari 2009.
- Hobsbawn, E. J. 1971. "From Social History to the History of Society". Dalam *Daedalus: Journal of the American Academy of Arts and Sciences*.
- Huen, P. Lim Pui, dkk. (ed.) 2000. *Sejarah Lisan di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Edisi ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana dan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Lombard, Denys. 2000. *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jilid I, II, dan III. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.



- Mangunwijaya, Y. B. 1981. *Burung-burung Manyar*. Jakarta: Djambatan.
- Norling, Bernard. 1960. *Towards A Better Understanding of History*. Notre Dame: University of Notre Dame.
- Pringgodigdo, A. K. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Shadily, Hassan. dkk. *Ensiklopedi Indonesia 3: Han - Kol*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru - Van Hoeve, t.th.
- . 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Supple, Barry E. (ed.). 1963. *The Experience of Economic Growth: Case Studies in Economic History*. New York: Random House.
- Tosh, John. 1991. *The Pursuit of History: Aims, Methods, and New Directions in the Study of Modern History*. London: Longman.
- . 1992. *Burung-burung Rantau*. Jakarta: Gramedia.